



Upaya Pemerintah Brazil Mengatasi Deforestasi Hutan Hujan Amazon Pada Era Luiz Inacio Lula Da Silva

Requela Owen Hutapea^{*1}, Frentika Wahyu Retnowatik²

^{1,2} Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119, Indonesia

*Corresponding Author: requela0306@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 24 October 2025

Revised 26 June 2026

Accepted 18 July 2026

Available 31 July 2026

E-ISSN: 0216-9290

How to cite:

Hutapea, R. O. & Retnowatik, F. W. (2026). Upaya Pemerintah Brazil Mengatasi Deforestasi Hutan Hujan Amazon Pada Era Luiz Inacio Lula Da Silva, POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 1(1), 26-30.

ABSTRACT

Deforestation of the Amazon Rainforest is caused by agribusiness expansion, illegal mining, and weak law enforcement. This research analyzes President Lula da Silva's efforts to combat deforestation in Brazil's Amazon Rainforest during the 2023-2024 period. Using descriptive in nature and uses secondary data. The data analysis technique used is qualitative, employing O'Neill's Environmentalism theory. The results of this research found that Lula da Silva's third term (2023-2024) prioritized controlling deforestation. At the domestic level, Lula da Silva's efforts included the reactivation of the fifth phase of the PPCDAm with market incentives, the appointment of Marina Silva as Minister of the Environment, and the strengthening of the capacity of IBAMA and ICMBio through increased budgets, personnel, and forest fire management programs. Brazil's efforts at the international level reaffirm the 2030 zero deforestation target in line with the Paris Agreement and lead the 2023 Amazon Conference, which resulted in the Belém Declaration. This policy has had a tangible impact, reducing deforestation by nearly 50% in 2023 compared to 2022, followed by a further decline of 30.6% between August 2023 and July 2024, demonstrating that domestic efforts and environmental diplomacy are working effectively together.

Keyword: Environmentalism, Deforestation, Amazon Rainforest, Lula da Silva

ABSTRAK

Deforestasi Hutan Hujan Amazon disebabkan oleh perluasan agribisnis, penambangan ilegal, dan penegakan hukum yang lemah. Penelitian ini menganalisis upaya Presiden Lula da Silva dalam memerangi deforestasi di Hutan Hujan Amazon Brasil selama periode 2023-2024. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dengan menerapkan Teori Environmentalism O'Neill. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa periode ketiga pemerintahan Lula da Silva (2023-2024) memprioritaskan pengendalian deforestasi. Di tingkat domestik, upaya Lula da Silva meliputi reaktivasi fase kelima PPCDAm dengan insentif pasar, penunjukan Marina Silva sebagai Menteri Lingkungan Hidup, serta penguatan kapasitas IBAMA dan ICMBio melalui peningkatan anggaran, personel, dan program pengelolaan kebakaran hutan. Upaya Brasil di tingkat internasional menegaskan target nol deforestasi pada tahun 2030 sesuai dengan Perjanjian Paris dan memimpin Konferensi Amazon 2023, yang menghasilkan Deklarasi Belém. Kebijakan ini telah memberikan dampak nyata, mengurangi deforestasi hampir 50% pada 2023 dibandingkan 2022, diikuti dengan penurunan lebih lanjut sebesar 30,6% antara Agustus 2023 dan Juli 2024, menunjukkan bahwa upaya domestik dan diplomasi lingkungan bekerja secara efektif bersama-sama.

Keyword: Environmentalisme, Deforestasi, Hutan Hujan Amazon, Lula da Silva



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://doi.org/10.32734/politeia.v18i02.23271>

1. Pendahuluan

Hutan Hujan Amazon dikenal sebagai paru-paru dunia karena berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global melalui fungsi penyimpanan oksigen dan pengatur suhu bumi (Britannica, 2023). Kawasan ini merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia, di mana sekitar 60% wilayahnya berada di Brazil, sedangkan sisanya tersebar di delapan negara lain, yaitu Kolombia, Peru, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, dan Suriname (Lindungi Hutan, 2022). Secara geografis, Amazon terletak di bagian utara Amerika Selatan dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Keberadaan ekosistem ini menjadi penopang penting dalam upaya mengendalikan perubahan iklim global dan menjaga siklus karbon dunia.

Meskipun memiliki peran ekologi yang vital, Hutan Amazon menghadapi ancaman serius akibat peningkatan deforestasi selama dua dekade terakhir. Sejak 2013, laju deforestasi di Brasil menunjukkan tren kenaikan. Pada 2018, luas hutan yang hilang mencapai 7.536 km², lalu meningkat menjadi 10.129 km² pada 2019, atau naik 34%. Tren ini berlanjut pada 2020 dengan deforestasi mencapai 10.851 km², naik 9,5% dibandingkan tahun sebelumnya dan 47% dibandingkan 2018 (INPE, 2023). Faktor-faktor pendorong deforestasi meliputi perluasan pertanian, terutama peternakan sapi dan budidaya kedelai, penebangan komersial, pertambangan emas, dan pengembangan infrastruktur yang memperluas akses ke kawasan hutan (Wegrowski, 2019). Aktivitas-aktivitas ini meningkatkan emisi karbon global dan memperparah pemanasan global (Fearnside, 2005).

Kebijakan pengendalian deforestasi Brazil menunjukkan adanya fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika politik. Pada masa Presiden Lula da Silva (2003-2010), kebijakan moratorium kedelai dan penguatan perlindungan kawasan hutan berhasil menurunkan laju deforestasi hingga 84% pada periode 2004-2012 (Follador, 2021). Namun, masa pemerintahan Michel Temer (2016-2018) dan Jair Bolsonaro (2019-2022) ditandai dengan pelonggaran regulasi lingkungan yang memicu kenaikan kembali tingkat deforestasi (Ferrante, 2019). Kembalinya Lula da Silva sebagai presiden pada tahun 2023 memunculkan harapan baru untuk membalikkan tren negatif tersebut, meskipun menghadapi tekanan kuat dari sektor agribisnis dan kepentingan ekonomi domestik yang kerap menolak kebijakan lingkungan yang ketat (Vilani, 2023). Upaya ini menjadi penting karena Brazil memegang peran kunci dalam pencapaian target pengurangan emisi karbon global dan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak lepas dari tantangan besar, seperti tekanan dari sektor agribisnis, kepentingan ekonomi domestik, dan resistensi politik di tingkat lokal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji kebijakan dan upaya pemerintah Brazil dalam mengatasi deforestasi Hutan Hujan Amazon pada masa pemerintahan Lula da Silva periode 2023-2024. Analisis ini berfokus pada upaya domestik, tantangan implementasi, dan hubungan antara kebijakan Brasil dengan komitmen internasional dalam pengendalian perubahan iklim. Pendekatan ini penting karena efektivitas upaya pengendalian deforestasi tidak hanya bergantung pada kebijakan nasional, tetapi juga pada dukungan politik, koordinasi antarlembaga, dan kerja sama dengan masyarakat sipil maupun aktor global.

Untuk menganalisis dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan teori environmentalis karena teori ini menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekologi sebagai bagian dari pembangunan global (Paterson, 2005). Environmentalisme memandang negara sebagai aktor utama dalam merumuskan kebijakan, namun juga menekankan kerja sama internasional dan peran aktor non-negara dalam tata kelola lingkungan global (*global environmental governance*) (O'Neill, 2009). Pendekatan ini relevan untuk menilai upaya Lula da Silva yang tidak hanya mengaktifkan kembali program domestik seperti *Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal* (PPCDAm), tetapi juga memperkuat komitmen Brazil melalui kerja sama multilateral seperti Paris Agreement dan Amazon Summit 2023 di Belém. Melalui kombinasi kebijakan nasional dan keterlibatan global, environmentalisme memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana Brazil berupaya menekan laju deforestasi sambil menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis upaya Presiden Lula da Silva dalam menekan deforestasi Hutan Hujan Amazon pada periode 2023-2024. Metode ini digunakan karena sesuai untuk menggambarkan kebijakan dan tindakan pemerintah Brazil tanpa melakukan manipulasi variabel. Fokus penelitian diarahkan pada kebijakan kehutanan dan lingkungan yang diterapkan selama pemerintahan Lula da Silva, khususnya regulasi, program pencegahan deforestasi, serta penguatan kelembagaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen, meliputi laporan resmi pemerintah Brazil, publikasi lembaga swadaya masyarakat, artikel berita, dan kajian akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, memilih, dan menginterpretasi berbagai sumber daring maupun cetak yang memuat informasi terkait kebijakan lingkungan dan perkembangan deforestasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis kualitatif, menarik kesimpulan berdasarkan teori environmentalis, terutama perspektif liberal yang menekankan pentingnya kerja sama internasional.

3. Hasil dan Penelitian

Deforestasi Hutan Amazon

Hutan Hujan Amazon merupakan ekosistem tropis terbesar di dunia dengan luas sekitar 6,7 juta km², di mana 60% wilayahnya berada di Brazil sehingga menempatkan negara ini sebagai aktor utama dalam menjaga kelestarian hutan tersebut (RAISG, 2022). Pemerintah Brazil mengatur kawasan ini dalam wilayah administratif *Amazônia Legal*, yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 1.806 tahun 1953. Secara geografis, wilayah ini mencakup sekitar 5 juta km² dengan ratusan kota madya di sembilan negara bagian, serta menjadi rumah bagi mayoritas masyarakat adat Brazil (IBGE, 2024). Masyarakat adat berperan penting dalam konservasi karena wilayah adat terbukti memiliki tingkat deforestasi lebih rendah dibandingkan area lain (FAO, 2021).

Tekanan terhadap Amazon meningkat sejak 1960-an, seiring kebijakan pembangunan nasional berupa program kolonisasi dan pembukaan infrastruktur. Proyek besar seperti pembangunan jalan Trans-Amazonian Highway (1972) mendorong migrasi penduduk, konversi hutan menjadi padang rumput, serta ekspansi

peternakan dan pertanian dalam skala luas (Fearnside, 2005). Kebijakan agraria pada periode 1970-1980 juga memberikan insentif kepada perusahaan untuk membuka lahan, sehingga terjadi siklus konversi hutan yang tidak berkelanjutan (Buschbacher, 1986).

Sejak dekade 1970-an, kebijakan pembangunan nasional di Brazil mulai mendorong eksploitasi besar-besaran terhadap Hutan Hujan Amazon. Proyek *Trans-Amazonian Highway* (1972) dan program kolonisasi seperti Polamazônia serta Polonoroeste membuka akses masif ke wilayah hutan dan memicu gelombang migrasi penduduk. Pada periode ini, deforestasi tahunan rata-rata mencapai lebih dari 20.000 km², terutama untuk konversi hutan menjadi padang rumput bagi peternakan sapi yang didukung kredit bersubsidi pemerintah (Buschbacher, 1986). Hingga 1988, diperkirakan lebih dari 376.000 km² hutan hilang akibat praktik konversi lahan yang tidak berkelanjutan.

Pada awal 1990-an, tekanan internasional terhadap Brazil sempat menurunkan laju deforestasi, tetapi tren ini berubah drastis pada pertengahan dekade. Tahun 1995 menjadi titik kritis ketika deforestasi mencapai rekor tertinggi 29.059 km² dalam satu tahun. Lonjakan tersebut dipicu oleh pemulihan ekonomi pasca krisis, peningkatan ekspor komoditas, serta lemahnya pengawasan lingkungan (da Silva, 2021). Kawasan paling terdampak antara lain negara bagian Pará dan Rondônia, yang menjadi pusat ekspansi agrikultur kedelai dan peternakan sapi (Moran, 1993). Kondisi ini semakin memperparah degradasi ekologis, seperti penurunan kesuburan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan percepatan pelepasan karbon ke atmosfer (Houghton, 2000).

Tren berbeda mulai terlihat setelah 2004 ketika pemerintahan Lula da Silva meluncurkan *Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal* (PPCDAm). Implementasi kebijakan berbasis pemantauan satelit, perluasan kawasan lindung, serta embargo kredit bagi daerah dengan deforestasi tinggi berhasil menurunkan kehilangan hutan tahunan dari 27.772 km² pada 2004 menjadi hanya 4.571 km² pada 2012 (Assunção, 2015). Periode ini dipandang sebagai fase paling berhasil dalam sejarah kebijakan lingkungan Brazil, karena selain menekan deforestasi, juga menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan.

Namun, capaian tersebut tidak bertahan lama. Sejak 2013, deforestasi kembali meningkat. Pada masa pemerintahan Dilma Rousseff, tekanan politik dari blok ruralis dan lemahnya kapasitas penegakan hukum membuat kebijakan konservasi kurang efektif (Marengo, 2018). Situasi semakin memburuk pada era Michel Temer, yang memangkas anggaran lembaga lingkungan dan memberi amnesti bagi perambah lahan (Climate Change News, 2017). Puncaknya terjadi pada masa Jair Bolsonaro (2019-2022), ketika deregulasi izin lingkungan, pemangkasan anggaran *Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais* (INPE), serta aliansi dengan sektor agribisnis menyebabkan laju deforestasi kembali menembus di atas 10.000 km² per tahun (Ferrante, 2019).

Dengan demikian, tren deforestasi Amazon 1970-2022 memperlihatkan pola fluktuatif yang dipengaruhi oleh orientasi politik dan ekonomi setiap pemerintahan. Periode keberhasilan 2004-2012 membuktikan bahwa kebijakan lingkungan yang tegas dan berbasis sains mampu memberikan dampak nyata,

sedangkan kemunduran setelahnya menunjukkan rapuhnya keberlanjutan jika kebijakan tidak didukung konsistensi politik dan kapasitas kelembagaan.

Upaya Pemerintah Brazil Mengatasi Deforestasi (2004-2022)

Periode 2004 menjadi titik balik penting dalam tata kelola lingkungan di Brazil. Presiden Lula da Silva meluncurkan *Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal* (PPCDAm) sebagai kerangka lintas sektoral yang melibatkan lebih dari sepuluh kementerian dan lembaga federal (Assunção, 2015). Program ini didesain untuk menekan laju deforestasi melalui integrasi kebijakan tata guna lahan, pengawasan, serta insentif ekonomi. Salah satu pilar utamanya adalah perencanaan tata guna lahan dan penataan hak milik, yang meliputi legalisasi kepemilikan tanah, delineasi kawasan konservasi, serta penerapan zonasi ekologis-ekonomi. Melalui pilar ini, pemerintah berupaya mencegah ekspansi ilegal dan memberikan kepastian hukum bagi kawasan lindung.

Pilar kedua adalah pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah memperkuat pemantauan dengan sistem satelit *Deteção de Desmatamento em Tempo Real* (DETER) yang mulai diterapkan pada 2005. Sistem ini memungkinkan deteksi dini perubahan tutupan hutan sehingga memudahkan operasi penindakan di lapangan. Penegakan hukum semakin diperkuat setelah keluarnya *Decreto Presidencial* No. 6.514 tahun 2008 yang menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan (Assunção, 2015). Pilar ketiga adalah insentif bagi pertanian berkelanjutan, termasuk akses kredit ramah lingkungan dan dukungan teknis bagi petani yang mematuhi aturan konservasi. Instrumen ini diperkuat melalui Resolusi *Conselho Monetário Nacional* No. 3.545 tahun 2008 yang mewajibkan bank menolak kredit bagi pelaku deforestasi ilegal (Neves, 2016). Kombinasi ketiga pilar ini menurunkan angka deforestasi tahunan dari 27.772 km² pada 2004 menjadi 4.571 km² pada 2012. Selain itu, laporan lembaga lingkungan mencatat adanya penurunan emisi gas rumah kaca secara signifikan akibat berkurangnya pembukaan hutan (Assunção, 2015).

Namun, keberhasilan tersebut tidak berlangsung konsisten karena dinamika politik domestik turut memengaruhi efektivitas PPCDAm. Presiden Dilma Rousseff (2011-2016) tetap mempertahankan program ini serta mempertegas komitmen Brazil dalam Paris Agreement, tetapi menghadapi tekanan dari blok Ruralista yang kuat di parlemen. Tekanan politik tersebut membuat penegakan hukum terhadap ekspansi agribisnis sering kali melemah (Marengo, 2018). Laporan lain juga menunjukkan bahwa keterbatasan koordinasi antar-lembaga mengurangi efektivitas pemantauan dan memperlambat penurunan deforestasi (CSIS, 2023).

Situasi semakin memburuk pada era Presiden Michel Temer (2016-2018). Kebijakan pemerintah cenderung melemahkan perlindungan lingkungan, misalnya pemotongan anggaran IBAMA dan usulan pembukaan kawasan lindung *Reserva Nacional de Cobre e Associados* (RENCA). Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan amnesti bagi perambah, yang secara tidak langsung mendorong pelanggaran lebih lanjut (Climate Change News, 2017). Wacana eksploitasi hutan untuk kepentingan ekonomi ini menimbulkan reaksi keras dari kelompok masyarakat sipil yang menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan komitmen iklim (Al Jazeera, 2017).

Krisis lingkungan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Jair Bolsonaro (2019-2022). Presiden Jair Bolsonaro secara terbuka mendukung perluasan agribisnis dan melemahkan lembaga lingkungan

melalui pemangkasan anggaran, deregulasi izin, serta intervensi politik terhadap lembaga pemantau satelit INPE (Abessa, 2019). Laporan lain juga menyoroti meningkatnya konflik agraria, perampasan tanah, serta praktik penebangan liar yang dibiarkan tanpa pengawasan ketat (Ferrante, 2019). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Jair Bolsonaro membuka ruang lebih luas bagi perusahaan pertambangan dan perkebunan besar untuk melakukan ekspansi di kawasan Amazon (Barbosa, 2021).

Secara keseluruhan, periode 2004-2012 mencerminkan keberhasilan pendekatan environmentalisme yang berbasis regulasi negara dan insentif pasar, yang berhasil menurunkan deforestasi dan emisi karbon. Namun, setelah 2013, tren tersebut berbalik akibat lemahnya penegakan hukum, tarik menarik kepentingan politik, serta pengaruh kelompok ekonomi yang dominan. Hal ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan kebijakan lingkungan di Brazil sangat ditentukan oleh stabilitas politik, konsistensi regulasi, dan kekuatan institusi negara dalam menghadapi tekanan ekonomi global.

Upaya Presiden Lula da Silva Periode Ketiga (2023-2024)

Kembalinya Lula da Silva sebagai Presiden Brazil pada Januari 2023 menandai kebangkitan agenda lingkungan di tingkat domestik maupun global. Setelah periode pemerintahan sebelumnya di bawah Jair Bolsonaro yang dikenal dengan kebijakan pro agribisnis dan lemahnya pengawasan lingkungan, Lula da Silva membawa visi baru dengan menempatkan pengendalian deforestasi sebagai prioritas utama. Data dari *Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais* (INPE) menunjukkan bahwa sepanjang 2023 tingkat deforestasi turun hingga 50% dibandingkan tahun 2022, dan kembali menurun 30,6% pada periode Agustus 2023 hingga Juli 2024. Angka ini merupakan capaian terendah dalam sembilan tahun terakhir, sekaligus mengindikasikan bahwa strategi pengendalian deforestasi Brazil mulai menunjukkan hasil konkret (Wenzel, 2024).

Deforestation rates in the Brazilian Amazon fell by 75% under Lula da Silva's previous presidency, and they're falling again in his third term

Deforestation rates are given in square kilometres (km²) per year. Luiz Inácio Lula da Silva was re-elected to become Brazilian president for 2023.

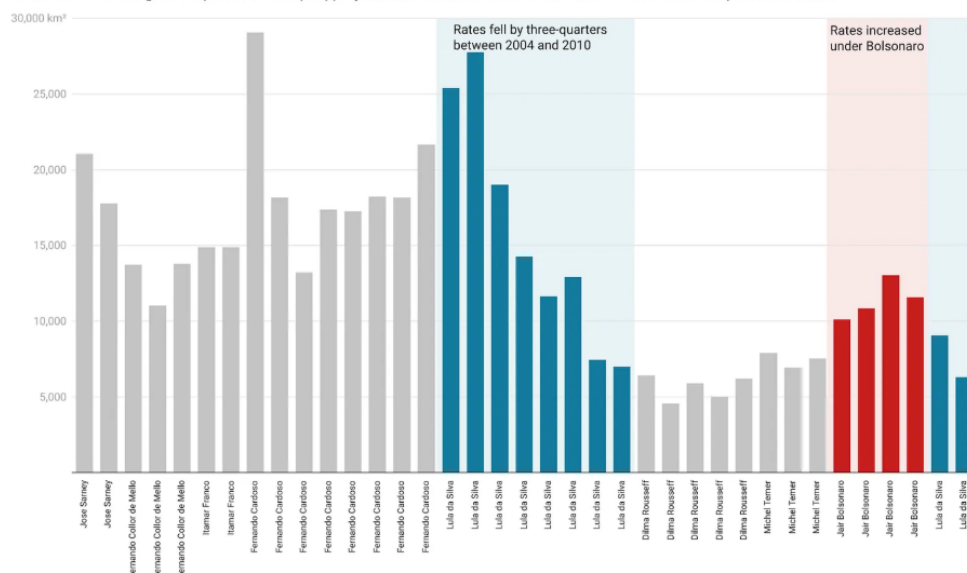


Chart: Hannah Ritchie • Source: INPE, Program for the Estimation of Deforestation in the Brazilian Amazon (PRODES) • Created with Datawrapper

Gambar 1. Grafik Deforestasi

Dalam ranah kebijakan domestik Lula da Silva, terdapat beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1. Reaktivasi *Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal* (PPCDAm) yang memasuki fase kelima pada 2023. Sejak pertama kali diluncurkan tahun 2004, PPCDAm berfungsi sebagai kerangka nasional lintas sektor untuk pencegahan deforestasi. Fase kelima yang diinisiasi Lula da Silva bukan sekadar melanjutkan kebijakan lama, melainkan memperluas pilar strategisnya dengan menambahkan instrumen insentif pasar berupa kredit hijau dan keringanan fiskal. Empat pilar utama yang dijalankan meliputi perencanaan tata guna lahan, pengawasan hukum berbasis pemantauan satelit, promosi praktik pertanian berkelanjutan, serta instrumen insentif pasar (MMA, 2004). Kehadiran insentif pasar ini menjadi pembeda signifikan karena tidak hanya mengandalkan pendekatan regulatif, tetapi juga menarik partisipasi sektor swasta dalam mendorong ekonomi hijau (Numadi, 2024).
2. Implementasi kebijakan yang dimana dikonsolidasikan melalui peran Marina Silva yang kembali ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada 2023. Marina Silva memiliki rekam jejak panjang dalam isu lingkungan sejak era pemerintahan Lula da Silva sebelumnya, dan penunjukannya dianggap simbol penting bagi pemulihan kredibilitas Brazil di panggung internasional. Di tingkat domestik, Marina Silva berfungsi sebagai koordinator utama lintas kementerian dan lembaga teknis seperti IBAMA, ICMBio, dan INPE. Ia mengintegrasikan PPCDAm dengan strategi diplomasi internasional, memperkuat transparansi data deforestasi, serta membuka ruang partisipasi masyarakat sipil. Hal ini sejalan dengan pendekatan *Science-Policy Interface*, di mana kebijakan publik berbasis pada hasil penelitian ilmiah dan pemantauan data (Al Jazeera, 2023). Dengan demikian, jika Lula da Silva berfungsi sebagai *policy maker*, maka Marina Silva menjadi *policy coordinator* yang memastikan kebijakan dijalankan secara efektif (Wenzel, 2024).
3. Selain itu, Presiden Lula da Silva meningkatkan kapasitas kelembagaan IBAMA (*Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis*) dan ICMBio (*Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade*). Dukungan anggaran dan penambahan personel menjadi prioritas, disertai program lapangan seperti *Manejo Integrado do Fogo* (MIF) yang diperluas ke berbagai wilayah federal dan tanah adat. Program ini tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran, tetapi juga melibatkan komunitas lokal dalam pencegahan kebakaran hutan. Pelatihan, pengadaan peralatan, serta koordinasi lintas otoritas dilakukan untuk menciptakan sistem manajemen kebakaran berbasis partisipasi masyarakat. Di negara bagian Brazil Mato Grosso dan Tocantins, penerapan MIF terbukti menurunkan luas area terbakar serta mengurangi konflik dengan komunitas adat yang sebelumnya sering terjadi akibat praktik pembakaran lahan tradisional (Prevfogo/Ibama, 2021). Dengan demikian, penguatan IBAMA dan ICMBio mencerminkan peran kelembagaan yang vital dalam memastikan bahwa kebijakan lingkungan tidak berhenti pada tataran regulasi, melainkan mampu diterapkan secara efektif di lapangan.

Namun demikian, efektivitas kebijakan domestik tidak terlepas dari tantangan. Pada awal 2024, aksi mogok yang dilakukan pegawai IBAMA dan ICMBio menjadi faktor penghambat serius. Aksi ini dipicu oleh tuntutan perbaikan gaji, bonus resiko, dan perekrutan pegawai baru, mengingat jumlah personel aktif kian menurun. Dari hampir 3.000 pegawai IBAMA, hanya sekitar 700 yang masih aktif di lapangan, sementara lebih dari 1.000 diperkirakan akan pensiun pada 2025 (Wenzel, 2024). Dampak langsung mogok kerja ini

sangat signifikan: jumlah surat pelanggaran yang diterbitkan menurun 86% pada awal 2024, dan banyak operasi lapangan terkait penertiban pembalakan liar maupun tambang ilegal harus dibatalkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan domestik Lula da Silva sangat bergantung pada penguatan kelembagaan, karena tanpa personel yang memadai dan dukungan logistik yang kuat, target ambisius *zero deforestation* 2030 akan sulit tercapai.

Dalam ranah internasional, Lula da Silva mengambil beberapa upaya yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya antara lain:

1. Pada awal masa jabatannya, Lula da Silva menegaskan kembali target *zero deforestation* 2030 sebagai bagian dari kontribusi Brazil dalam Paris Agreement. Sektor kehutanan yang menjadi penyumbang utama emisi di Brazil ditempatkan sebagai fokus utama strategi mitigasi iklim. Dengan menghidupkan kembali target ini, Brazil tidak hanya memperlihatkan kepatuhan formal pada rezim global, tetapi juga berupaya memposisikan diri sebagai pemimpin diplomasi iklim (Governo do Brasil, 2023).
2. Komitmen internasional tersebut diperkuat ketika Brazil menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Amazon pada Agustus 2023 di Belém. Pertemuan delapan negara anggota ACTO (*Amazon Cooperation Treaty Organization*) menghasilkan Deklarasi Belém yang memuat 113 butir kesepakatan. Kesepakatan ini mencakup pengakuan legal wilayah adat, penguatan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, kerja sama pemantauan satelit lintas negara, serta pembentukan Observatorium Amazon sebagai pusat pertukaran data ilmiah (DW, 2023). Deklarasi ini menegaskan bahwa keberlanjutan Amazon tidak dapat ditangani oleh satu negara saja, melainkan membutuhkan koordinasi regional dan partisipasi aktor non negara.
3. Melalui forum internasional, Brazil membangun kembali citra internasional sebagai pemimpin *green multilateralism*. Konsep ini menekankan pentingnya kerja sama multilateral berbasis prinsip lingkungan untuk mengatasi tantangan ekologi global. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Lula da Silva tidak hanya berfokus pada kepentingan domestik, tetapi juga memperlihatkan kesediaan untuk berbagi tanggung jawab global. Hal ini terlihat dari upaya Brazil dalam mendorong sistem pemantauan kolektif serta harmonisasi pelaporan deforestasi antarnegara Amazon, meskipun deklarasi tersebut belum mengikat secara hukum (Mongabay, 2023).

Secara teoretis, kebijakan Lula da Silva periode 2023-2024 merepresentasikan dua dimensi utama environmentalisme. Pertama, *State-Oriented* environmentalisme tercermin dalam reaktivasi PPCDAm, penguatan IBAMA dan ICMBio, serta peran Marina Silva yang menegaskan pentingnya kapasitas kelembagaan dalam pencegahan deforestasi. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana negara memanfaatkan instrumen hukum, kelembagaan, dan kebijakan publik untuk mengendalikan degradasi lingkungan (O'Neill, 2009). Kedua, liberal environmentalisme terlihat dari keterlibatan aktif Brazil dalam Paris Agreement dan Deklarasi Belém, yang menekankan kerja sama multilateral, norma internasional, serta peran aktor non-negara dalam penyelesaian krisis lingkungan global (O'Neill, 2009).

Kombinasi dua dimensi tersebut berhasil menurunkan deforestasi secara signifikan pada 2023-2024, sekaligus mengembalikan Brazil pada jalur kepemimpinan lingkungan global. Namun demikian, keberlanjutan target ambisius *zero deforestation* 2030 masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kapasitas kelembagaan domestik, dukungan politik jangka panjang, dan resistensi dari kepentingan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya. Dengan demikian, pengalaman 2023-2024 memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh komitmen politik di tingkat pusat, tetapi juga oleh kemampuan untuk memastikan implementasi kebijakan yang konsisten, adaptif, dan inklusif terhadap aktor-aktor lokal maupun transnasional.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika deforestasi Amazon dipengaruhi oleh interaksi faktor ekonomi, politik, dan kelembagaan. Sejak 1970, kebijakan pembangunan yang berorientasi pada infrastruktur dan ekspansi agrikultur mendorong hilangnya jutaan hektar hutan. Titik balik baru terjadi pada 2004 melalui kebijakan *Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal* (PPCDAm), yang berhasil menekan deforestasi hingga mencapai angka terendah pada 2012. Keberhasilan ini didorong oleh tiga pilar utama yaitu, penataan tata guna lahan, pengawasan dan penegakan hukum berbasis satelit, serta insentif pertanian berkelanjutan. Namun, capaian tersebut tidak berlanjut secara konsisten. Pada era Dilma Rousseff efektivitas melemah akibat tekanan politik, sementara pemerintahan Michel Temer dan Jair Bolsonaro justru mempercepat degradasi melalui deregulasi, pemangkasan anggaran, dan aliansi dengan sektor agribisnis.

Kembalinya Lula da Silva pada 2023 menandai upaya pemulihan agenda lingkungan Brazil. Reaktivasi PPCDAm fase kelima, pengangkatan Marina Silva sebagai Menteri Lingkungan Hidup, serta penguatan IBAMA dan ICMBio memperlihatkan komitmen domestik yang lebih kuat. Secara internasional, keterlibatan dalam Paris Agreement dan Deklarasi Belém menegaskan reposisi Brazil sebagai pemimpin diplomasi iklim. Hasilnya terlihat pada penurunan deforestasi hingga 50% sepanjang 2023 dan 30,6% pada 2024, meskipun kelembagaan masih menghadapi keterbatasan. Dari perspektif environmentalisme, kebijakan Lula da Silva menggabungkan pendekatan negara yang mengandalkan instrumen hukum dan kelembagaan, serta pendekatan liberal yang menekankan kerja sama multilateral. Dengan demikian, pencapaian ambisi nol deforestasi pada 2030 hanya dapat diwujudkan melalui konsistensi kebijakan domestik, penguatan kapasitas pengawasan, serta komitmen Brazil dalam memperkuat rezim lingkungan internasional.

Daftar Pustaka

- Abessa, D., Famá, A., & Buruaem, L. (2019). The systematic dismantling of Brazilian environmental laws risks losses on all fronts. *Nature ecology & evolution*, 3(4), 510-511.
- Al Jazeera. (2017, July 22). Activists decry Temer's Amazon deforestation bill.
- Assunção, J., Gandour, C., & Rocha, R. (2015). Deforestation slowdown in the Brazilian Amazon: prices or policies?. *Environment and Development Economics*, 20(6), 697-722.
- Barbosa, L. G., Alves, M. A. S., & Grelle, C. E. V. (2021). Actions against sustainability: Dismantling of the environmental policies in Brazil. *Land use policy*, 104, 105384.
- Buschbacher, R. J. (1986). Tropical deforestation and pasture development. *BioScience*
- Climate Change News. (2017, May 31). Brazil's Temer slashes environment budget, undermining forest protection. *Climate Change News*.

- CSIS. (2023, June 22). Cattle Supply Chains and Deforestation of the Amazon. Center for Strategic and International Studies.
- Da Silva, H. M., & de Brito, E. P. (2021). O mito moderno da natureza intocada. *Revista Tocantinense de Geografia*, 10(20), 273-277.
- DW. (2023). KTT Amazon di Brasil Bahas Kebijakan Bersama. [https://www.dw.com/id/ktt-amazon-di-brasil-bahas-kebijakan-bersama/a-66468705#](https://www.dw.com/id/ktt-amazon-di-brasil-bahas-kebijakan-bersama/a-66468705#:): DW.
- FAO & FILAC. (2021). Forest governance by indigenous and tribal peoples: An opportunity for climate action in Latin America and the Caribbean. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fearnside, L. F. (2019). Brazil's new president and 'ruralists' threaten Amazonia's environment, traditional peoples and the global climate. Cambridge University, 261-263.
- Fearnside, P. M. (2005). Deforestation in Brazilian Amazonia: history, rates, and consequences. *Conservation biology*, 19(3), 680-688.
- Governo do Brasil. (2023, April). President Lula highlights Brazil's commitment to zero deforestation by 2030 and calls for action by developed countries during climate and energy forum. Planalto.
- Houghton, R. A., Hobbie, J. E., Melillo, J. M., Moore, B., Peterson, B. J., Shaver, G. R., & Woodwell, G. M. (1983). Changes in the Carbon Content of Terrestrial Biota and Soils between 1860 and 1980: A Net Release of CO₂ to the Atmosphere. *Ecological monographs*, 53(3), 235-262.
- Hutan, L. (2022). Hutan Amazon: Pengertian, Karakteristik dan Fakta Menariknya (Update 2022). <https://lindungihutan.com/blog/hutan-amazon/>: Lindungi Hutan.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2024). Amazônia Legal: limites municipais e área total [Data Geográfica]
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). (2021). Programa Nacional de Manejo Integrado do Fogo – Relatório de atividades 2021. Prevfogo/IBAMA.
- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. (2023). Monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal por satélite: Sistema PRODES. São José dos Campos: INPE
- Jazeera, A. (2023). Brazil's President Lula unveils plan to end deforestation by 2030. <https://www.aljazeera.com/news/2023/6/6/brazils-president-lula-unveils-plan-to-end-deforestation-by-2030>: Al Jazeera.
- Marco Follador, B. S. (2021). Brazil's sugarcane embitters the EU-Mercosur trade talks. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93349-8>: Scientific Reports.
- Marengo, J. A., Souza Jr, C. M., Thonicke, K., Burton, C., Halladay, K., Betts, R. A., ... & Soares, W. R. (2018). Changes in climate and land use over the Amazon region: current and future variability and trends. *Frontiers in Earth Science*, 6, 228.
- Matthias, M. (2023). *Amazonas Region, Indigenous Tribes, Rainforest - Britannica*. <https://www.britannica.com/place/Amazonas-political-division-Colombia>.
- Ministério do Meio Ambiente (MMA). (2004). Plano de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm). Brasília: Ministério do Meio Ambiente.
- Mongabay. (2023, August 9). Amazon Summit nations agree on saving rainforest — but not on conservation goals. Mongabay.
- Moran, E. F. (1993). Deforestation and land use in the Brazilian Amazon. *Human ecology*, 21, 1-21.
- Neves, E. M. S. C., & Whately, M. (2016). Municipalities and policies against deforestation in the Brazilian Amazon. *Novos estudos CEBRAP*, 35(3), 67-83.
- Numadi, K. R. (2024). The Brazilian Amazon Forest restoration under the leadership of President Lula da Silva. *Journal of Political Issues*, 17(1), 1–20.
- O'Neill, K. (2017). The environment and international relations. Cambridge University Press.
- Paterson, Matthew. 2005. Theories of International Relations. New York: Palgrave Macmillan.
- RAISG. (2022). Amazon mining: Expansion of mining in the Amazon region. Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).
- Vilani, R. M., Ferrante, L., & Fearnside, P. M. (2023). The first acts of Brazil's new president: Lula's new Amazon institutionality. *Environmental Conservation*, 50(3), 148-151.
- Wegrowski, B. (2019). *Deforestation in the Amazon Rainforest*. <https://ballardbrief.byu.edu/issue-briefs/deforestation-in-the-amazon-rainforest>: Ballard Brief